



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kepemudaan Dan Keolahragaan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
9. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
10. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
11. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi Kabupaten Tanah Laut berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
13. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

Pasal 2

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan pelayanan Kepemudaan di Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2029.
- (2) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2029 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana aksi nasional Kepemudaan.
- (4) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Kedudukan RAD Pelayanan Kepemudaan

Pasal 5

RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai pelayanan Kepemudaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. bagian hukum;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. organisasi Kepemudaan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi koordinator pelaksana penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi
Pasal 7

Tugas dan Fungsi tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan dan menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menentukan peran masing-masing dalam Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan;
- c. melakukan koordinasi dengan organisasi Kepemudaan dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan, penyelenggaraan dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan;
- d. menyampaikan rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan untuk direviu, kemudian menyerahkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- e. menyediakan konsultasi bagi Perangkat Daerah terkait Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan dan dokumen evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan;
- f. menerima hasil evaluasi ketercapaian pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan menyusun hasil evaluasi sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi;
- g. menyusun dan menyerahkan laporan Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Bupati untuk diteruskan kepada Menteri 1 (satu) tahun sekali;
- h. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 8

- (1) Perencanaan dan penganggaran bagi RAD Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan dengan pendekatan 2 (dua) jalur, meliputi:
 - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
 - b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Kepemudaan.
- (2) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (3) Pemenuhan pendanaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Mekanisme perencanaan dan penganggaran bagi RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Kepemudaan;
- b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- c. mengakomodasi kebutuhan Kepemudaan; dan
- d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Kepemudaan.

Pasal 10

Integrasi kepentingan Kepemudaan dalam mekanisme Perencanaan dan penganggaran diwujudkan dalam hal:

- a. berbentuk analisis kepemudaan yang didasarkan pada kondisi dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan Daerah; dan
- b. pelibatan Kepemudaan dalam formulasi kebijakan.

Pasal 11

- (1) Mekanisme perencanaan dan penganggaran bagi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan melalui penggunaan instrumen perencanaan dan penganggaran.
- (2) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah terkait Kepemudaan.
- (3) Instrumen perencanaan dan penganggaran yang dimaksud pada ayat (1) yaitu pernyataan anggaran Kepemudaan.
- (4) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari pernyataan anggaran dan strategi pelaksanaan kegiatan Kepemudaan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) memberikan informasi bahwa suatu kegiatan dirancang Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian output kegiatan untuk menangani permasalahan Kepemudaan.

BAB IV

MEKANISME EVALUASI TERHADAP RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pelayanan Kepemudaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian rencana aksi nasional pelayanan Kepemudaan dan RAD Pelayanan Kepemudaan dengan:
 - a. dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, dan Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan program kegiatan kementerian/lembaga, dan Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait pelayanan Kepemudaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan melalui Dinas menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan diteruskan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali melalui Gubernur.

BAB V PENUTUP Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Februari 2024
Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

DAHNIAL KIFLI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 12 Februari 2024

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2024 - 2026

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/ BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELIN E (2022)	TARGET				SKPD PELAKSANA
	KOD E	PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT (RO)			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)
PROGRAM SINERGIS ANTAR SEKTOR DALAM HAL PENYADARAN PEMBERDAYAAN SERTA PENGEMBANGAN	Domain Pendidikan : 1. Rata-rata lama sekolah pemuda 2. Angka partisipasi kasar sekolah menengah pemuda 3. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	-	8,00	8,00	7,00	7,00	KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT	
		Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Sekolah	-	5285	5295	5305	5315	KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT	

		Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/ Sederajat						
	Bentuk Koordinasi : a. Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan b. Peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan c. Peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal	Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Atas (SMP)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB)/ Sederajat	-	1650	1660	1670	1680	KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT

		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
		Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	31 Objek	31 Objek	31 Objek	31 Objek	31 Objek	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							
		Kegiatan : Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah							

		Kabupaten/Kota							
		Sub Kegiatan : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	90	100	100	100	100	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
		Kegiatan : Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi							
		Sub Kegiatan : 1. Peran Serta Masyarakat	Jumlah Bank Sampah yang Terbina	25					

DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

		2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		5	5	5	5	
		3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Rakyat Layak Huni yang Dibangun	285					
		4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman			90	90	90	

		a Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						
		5. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH Terehabilitasi	178					
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		273	480	480	480	
		6. Koordinasi dan Singkronisasi Pengentian Sumber Pencemaran	Jumlah Bibit yang di Tanam	400					
		7. Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		1				
		8. Koordinasi dan Singkronisasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi,			1	1	1	

		Pemantauan Situasi Politik							
		Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3265 Orang (99%)	861 Orang (100%)	1200 Orang (100%)	1200 Orang (100%)	1200 Orang (100%)	

		2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		583 Orang (100%)	275 Orang (100%)	300 Orang (100%)	300 Orang (100%)	
		3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	88 Kali (100%)					

		Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa							
		4. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5. Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka			37 Orang	37 Orang	37 Orang	
		6. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila			33 Orang	33 Orang	33 Orang	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
		Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap	Jumlah warga terdampak bencana alam dan sosial , orang terlantar yang mendapat	8.202	10.000	10.000	10.000	10.000	DINAS SOSIAL

		Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	40 Orang	50 Orang	75 Orang	125 Orang	150 Orang	
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	100%	100%	100%	100%	100%	

			Pelatihan Teknis Pendukung Program YESS (Youth Entrepreneurs hip And Employment Support Services)	-	-	136 Orang	-	-	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan	0	33 Perpustakaan	33 Perpustakaan	33 Perpustakaan	34 Perpustakaan	

		Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Standar Nasional Perpustakaan						
		2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	66 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	
		3. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	0	11 Layanan	11 Layanan	11 Layanan	11 Layanan	

		4. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 eksemplar	1 Aplikasi	8779 eksemplar	10973 eksemplar	13717 eksemplar	
		Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	0	100%	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : 1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	0	12 lokus	172 lokus	171 lokus	171 lokus	

		2. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	0	18 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	
		3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0	0	3	3	3	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/ BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2022)	TARGET				SKPD PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT (RO)			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	

	<p>Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja :</p> <p>1. Pemuda wirausaha dan kesempatan kerja</p> <p>2. Tingkat pengangguran terbuka pemuda</p> <p>Bentuk Koordinasi : Peningkatan daya saing wirausaha pemuda</p>	<p>Persentase penduduk berusia 16 - 30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16 - 30 tahun</p>						
		<p>Persentase jumlah pengangguran pemuda berusia 16 - 30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja pemuda berusia 16 - 30 tahun</p>						

		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							DINAS PARIWISATA
		Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0	100%	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
		Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Capaian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100% (45 Orang)	100% (45 Orang)	100% (515 Orang)	100% (120 Orang)	100% (120 Orang)	
		Sub Kegiatan : 1. Pelatihan dasar SDM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM	25 Orang	25 Orang	435 Orang	60 Orang	60 Orang	

		Kepariwisataan bagi Masyarakat dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)						
		2. Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	25 Orang	80 Orang	60 Orang	60 Orang	
		Kegiatan : Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Capaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100% (25 Orang)	0%	100% (30 Orang)	100% (60 Orang)	100% (60 Orang)	
		Sub Kegiatan : Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	25 Orang	0 Orang	30 Orang	60 Orang	60 Orang	

		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah OKP dan wirausaha	9 5 OKP Wirausa ha	10 5 OKP Wirausa ha	11 5 OKP Wirausa ha	12 5 OKP Wirausa ha	13 5 OKP Wirausa ha	
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kot a	Jumlah PSP3	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	
		Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap	Jumlah OKP dan wirausaha	9 OKP 5 Wirausa ha	12 OKP 7 Wirausa ha	14 OKP 10 Wirausa ha	16 OKP 12 Wirausa ha	18 OKP 14 Wirausa ha	

		Pemuda Pelopor Kabupaten/Kot a, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kot a						
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan an Pemuda	Jumlah Paskibraka	39 Orang	-	-	-	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN						
		Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi Pramuka	1 Kwarcab	1 Kwarcab	1 Kwarcab	1 Kwarcab	1 Kwarcab
		Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan	Jumlah organisasi Pramuka	1 Kwarcab	1 Kwarcab	1 Kwarcab	1 Kwarcab	1 Kwarcab

		Tingkat Daerah						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN						
		Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah provinsi	Jumlah Cabang Olahraga dan Atlet Berprestasi	30 Cabor 110 Atlet Cabor	32 Cabor 120 Atlet Cabor	33 Cabor 140 Atlet Cabor	35 Cabor 160 Atlet Cabor	40 Cabor 200 Atlet Cabor
		Sub Kegiatan : 1 Seleksi Atlet Daerah	1. Jumlah Atlet, Instruktur, Asisten Instruktur dan Petugas Lapangan	200 Orang	205 Orang	210 Orang	220 Orang	230 Orang
			2. Jumlah Cabor	8 Cabor	10 Cabor	12 Cabor	15 Cabor	20 Cabor
			3. Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	7 Kegiatan
		2. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Sektoral	1. Jumlah Cabor	11 Cabor	13 Cabor	15 Cabor	18 Cabor	20 Cabor
			2. Jumlah Jenis Barang	41 Jenis Barang	44 Jenis Barang	46 Jenis Barang	48 Jenis Barang	50 Jenis Barang

		Olahraga							
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
		Kegiatan : Pelebagaan Pangarusutama an Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Presentase SKPD yang melaksanakan PPRG	4,64%	50%	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		40 Perangk at Daerah	43 Perangk at Daerah	43 Perangk at Daerah	43 Perangk at Daerah	

		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			43 Dokumen	43 Dokumen	43 Dokumen	
		Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Pembinaan Pada Kelompok Industri rumahan		35 Kelompok	41 Kelompok	47 Kelompok	50 Kelompok	
		Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		2.000 Orang	2.000 Orang	2.000 Orang	2.000 Orang	

		Kewenangan Kabupaten/Kota							
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							DINAS PERINDUSTRI AN
		Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							DINAS TANAMAN PANGAN DAN

		Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Kabupaten/Kota						
		Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	77 Orang	50 Orang	326 Orang	335 Orang	346 Orang	
		Kegiatan : Pendidikan dan Latihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pendidikan dan Latihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	50 Orang	200 Orang	250 Orang	300 Orang	

		Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
		Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase capaian Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataa, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	50%	50%	100%	100%	100%	

		Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	77 Orang	50 Orang	326 Orang	335 Orang	346 Orang		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
		Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Kecil yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase capaian Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataa, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	50%	50%	100%	100%	100%		

		Sub Kegiatan : 1. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	7043 Unit Usaha	100 Unit Usaha	110 Unit Usaha	140 Unit Usaha	180 Unit Usaha		
		2. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	-	-	20 Orang	30 Orang	30 Orang		
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								
		Kegiatan : Penyelenggara n Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang	Persentase pelaku usaha yang berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	-	-	100%	100%	100%		

		bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	-	-	30 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							
		Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	45 UMKM	50 UMKM	55 UMKM	

		Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Pelayanan Antar Kerja	6,2%	6,5%	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : 1. Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	35 Orang	50 Orang	450 Orang	862 Orang	842 Orang	
		2. Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	100 Orang	1700 Orang	1700 Orang	1790 Orang	
		Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Capaian Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui job Fair/Bursa Kerja	-	-	75 Orang	85 Orang	100 Orang	

KOORDINASI STRATEGI	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/ BENTUK KOORDINASI	INDIKATOR	BASELINE (2022)	TARGET	SKPD PELAKSANA
---------------------	---	-----------	-----------------	--------	----------------

S LINTAS SEKTOR	KOD E	PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT (RO)			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)
		Domain Partisipasi dan Kepemimpinan : 1. Partisipasi Pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 2. Partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi 3. Pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan	Persentase pemuda berusia 16 - 30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir						
		Bentuk Koordinasi : a. Peningkatan kualitas kesehatan pemuda b. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepeloporan c. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepemimpinan	Persentase pemuda berusia 16 - 30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah						

		dalam 3 bulan terakhir						
		Persentase pemuda berusia 16 -30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/ pendapat dalam rapat tersebut						
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						DINAS LINGKUNGAN

		Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi							HIDUP
		Sub Kegiatan : 1. Peran Serta Masyarakat	Jumlah Bank Sampah yang Terbina	25					
		2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Masyarakat		5	5	5	5	
		3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Rakyat Layak Huni	285					

		dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	yang Dibangun					
		4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			90	90	90
			Jumlah RTLH Terehabilitasi	178				
		5. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		273	480	480	480
		6. Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Bibit yang di Tanam	400				

		Pengentian Sumber Pencemaran							
		7. Koordinasi, Singkroniasasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkroniasasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		1				
		8. Koordinasi dan Singkroniasasi Rehabilitasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Singkroniasasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			1	1	1	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
		Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang tumbuh dan aktif melaksanakan usaha	9	9	9	9	9	DINAS SOSIAL

			kesejahteraan sosial						
		Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Latihan dasar PSM, Jumlah PSM yang diseleksi	1 & 135	1 & 135	1 & 135	1 & 135	1 & 135	
		2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek yang diikuti TKSK, Jumlah Honor TKSK yang dibayarkan untuk 11 orang, jumlah rapat	2 12 2	2 12 2	2 12 2	2 12 2	2 12 2	
		3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Puskesmas, penyuluh sosial, pendamping PKH dan relawan sosial	290 50 135 12	290 50 135 12	290 50 135 12	290 50 135 12	290 50 135 12	

			yang mengikuti Bimtek, Jumlah Fasilitator SLRT yang mengikuti Bimtek, Jumlah pembinaan Karang Taruna, jumlah rapat						
		Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang tumbuh dan aktif melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	9	9	9	9	9	

		Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	11	11	11	11	11	
		2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kot a, Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Ko	1 & 0	2 & 0	1 & 0	1 & 0	1 & 0	

			ta						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Mandiri (2024-2026)	20%	20%	13%	16%	19%	

		<p>Sub Kegiatan :</p> <p>1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.</p>	<p>Jumlah Dokumen Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.</p>	20 Orang	20 Orang	25 Orang	30 Orang	35 Orang	
		<p>2. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang</p>	<p>Jumlah Dokumen lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT, RW,</p>	20 Orang	15 Orang	20 Orang	25 Orang	30 Orang	

		Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OKP dan wirausaha	9 5 OKP Wirausaha	10 5 OKP Wirausaha	11 5 OKP Wirausaha	12 5 OKP Wirausaha	13 5 OKP Wirausaha	
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah PSP3	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	

		Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah OKP dan wirausaha	9 OKP dan 5 Wirausaha	12 OKP dan 7 Wirausaha	14 OKP dan 10 Wirausaha	16 OKP dan 12 Wirausaha	18 OKP dan 14 Wirausaha
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Paskibraka	39 Orang	-	-	-	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN						
		Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi Pramuka	1 Kwarcab	1 Kwarcab	1 Kwarcab	1 Kwarcab	1 Kwarcab
		Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat	Jumlah organisasi Pramuka	1 Kwarcab	1 Kwarcab	1 Kwarcab	1 Kwarcab	1 Kwarcab

		Daerah						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
		Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah provinsi	Jumlah Cabang Olahraga dan Atlet Berprestasi	30 Cabor 110 Atlet Cabor	32 Cabor 120 Atlet Cabor	33 Cabor 140 Atlet Cabor	35 Cabor 160 Atlet Cabor	40 Cabor 200 Atlet Cabor
		Sub Kegiatan : 1 Seleksi Atlet Daerah	1. Jumlah Atlet, Instruktur, Asisten Instruktur dan Petugas Lapangan	200 Orang	205 Orang	210 Orang	220 Orang	230 Orang
			2. Jumlah Cabor	8 Cabor	10 Cabor	12 Cabor	15 Cabor	20 Cabor
			3. Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	7 Kegiatan
		2. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Sektoral Olahraga	1. Jumlah Cabor	11 Cabor	13 Cabor	15 Cabor	18 Cabor	20 Cabor
			2. Jumlah Jenis Barang	41 Jenis Barang	44 Jenis Barang	46 Jenis Barang	48 Jenis Barang	50 Jenis Barang

	<p>Bentuk Koordinasi :</p> <p>a. Penguatan pemberdayaan pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan terkait persoalan pemuda</p> <p>b. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, prikotropika, dan zat adiktif lainnya</p> <p>c. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian pemuda terkait persoalan pemuda meliputi seks bebas, human immunodeficiency virus/ acquired immunodeficiency syndrome, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan</p>	<p>Jumlah kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda yang terlaksana dan dimanfaatkan</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH
		Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							
		Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	-	-	1	1	-	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya							

		Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	530 Orang (99%)	1925 Orang (100%)	1110 Orang (100%)	1110 Orang (100%)	1110 Orang (100%)	
		2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat				180 Orang (100%)	180 Orang (100%)	180 Orang (100%)	

		Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							BAPPEDA
		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
		Sub Kegiatan : 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang Di Koordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	2	2	2	2	

		2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Yang Di Koordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	2	2	2	2	
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							DINAS KEHUTANAN
		Kegiatan : Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara							
		Sub Kegiatan : Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar	Pendistribusian/ Penanaman Bibit Tanaman (kerjasama	2 Penggiat Lingkungan	2 Penggiat Lingkungan	2 Penggiat Lingkungan	2 Penggiat Lingkungan	2 Penggiat Lingkungan	

		Kawasan Hutan Negara	pengiat lingkungan pemuda)	Pemuda	Pemuda	Pemuda	Pemuda	Pemuda
		Kegiatan : Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu- langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA} 15 Kelompok.	2	3	3	3	3
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						
		Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						
		Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Pembinaan Kelompok Tani Hutan Pemuda (KTH	1 KTH	1 KTH	1 KTH	1 KTH	1 KTH

		Kelompok Tani Hutan	Pinang Muda)						
--	--	---------------------	--------------	--	--	--	--	--	--

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/ BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2022)	TARGET				SKPD PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT (RO)			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	
	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan : 1. Angka Kesakitan Pemuda 2.Pemuda korban kejahatan 3.Pemuda Merokok 4.Remaja perempuan sedang hamil Bentuk Koordinasi : a. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks		Proporsi Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/ aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir						

	<p>bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus/ acquired immunodeficiency syndrome, dan perdagangan manusia</p> <p>b. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial</p>	<p>Proporsi Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir</p>						
	<p>c. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan</p> <p>d. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental</p>	<p>Persentase Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir</p>						
	<p>e. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya</p> <p>f. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan</p>	<p>Persentase remaja perempuan berusia 15 - 18 tahun yang sedang hamil</p>						

	untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa g. Peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda h. Pelindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi								
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							
		Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,	3265 Orang (99%)	861 Orang (100%)	1200 Orang (100%)	1200 Orang (100%)	1200 Orang (100%)	

		Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					
		2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		583 Orang (100%)	275 Orang (100%)	300 Orang (100%)	300 Orang (100%)
		3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	88 Kali (100%)				

		Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						
		4. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka			1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n
		5. Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka			37 Orang	37 Orang	37 Orang
		6. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila			33 Orang	33 Orang	33 Orang
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA						
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang						

		Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya						
		Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	530 Orang (99%)	1925 Orang (100%)	1110 Orang (100%)	1110 Orang (100%)	1110 Orang (100%)
		2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan				180 Orang (100%)	180 Orang (100%)	180 Orang (100%)

		Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							DINAS KESEHATAN
		Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat	53%	55%	60%	65%	70%	
		Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	

		Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat	53%	55%	60%	65%	70%	
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
		Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hasil bimbingan teknis dan supervisi UKBM	0%	0%	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	

			(UKBM)						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PER ORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
		Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6825 Orang	6833 Orang	6851 Orang	6866 Orang	6881 Orang	
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan	5939 Orang	6511 Orang	6539 Orang	6554 Orang	6569 Orang	

			Kesehatan Sesuai Standar						
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3846 Orang	6201 Orang	6228 Orang	6242 Orang	6246 Orang	
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	29013 Orang	25168 Orang	30882 Orang	30898 Orang	30914 Orang	
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	46843 Orang	47227 Orang	51537 Orang	51600 Orang	51650 Orang	
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Uraian : Penyuluhan dan skrining KTR ke sekolah)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	77688 Orang	224677 Orang	225800 Orang	226929 Orang	228064 Orang	

		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	12105 Orang	26211 Orang	27096 Orang	27231 Orang	27367 Orang	
		9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3402 Orang	5500 Orang	4516 Orang	4538	4561	
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	481 Orang	500 Orang	502 Orang	504 Orang	506 Orang	
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Uraian : Skrining TBC di Ponpes)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	1323 Orang	5694 orang	5403 Orang	5394 Orang	5391 Orang	

			Pelayanan Sesuai Standar						
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Uraian : Penyuluhan IMS ,HIV / AIDS di sekolah SMU/Sederajat)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2604 Orang	7370 orang	7726 Orang	8165 Orang	8325 Orang	
		13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat	0 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	

			Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar						
		15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21 Dokumen	21 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
		16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	21 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
		17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
		18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	63 Dokumen	

		Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya						
	19. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	3 Dokume n	
	20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4638 Orang	4651 Orang	4675 Orang	4698 Orang	14024 Orang	
	21. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	3 Dokume n	
	22. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	3 Dokume n	

	Kabupaten/Kota Sehat						
23. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	
24. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	
25. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Uraian : Penyuluhan PHBS ke sekolah, penyuluhan reproduksi ke sekolah)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	

		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							DINAS KOMUNIKA SI DAN INFORMATI KA
		Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi							
		Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi positif yang disebarluaskan di masyarakat guna mendukung usaha dan kreatifitas para pemuda	-	10	15	20	25	
		2. Pelayanan Informasi Publik							
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
		Kegiatan : Pengelolaan E/Government di Lingkup Pemerintah Provinsi							
		Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah kegiatan sosialisasi Digitalisasi UMKM Pengusaha Muda	-	10	15	20	25	

		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							DINAS PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDU NGAN ANAK
		Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan		80%	85%	90%	100%	
		Sub Kegiatan : 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		25 Perangka t daerah	25 Perangk at daerah	25 Perangk at daerah	25 Perangk at daerah	
		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam			12 Dokume n	12 Dokume n	12 Dokume n	

		terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan KtPA/TPPO						
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan bagi perempuan Korban Kekerasan dan/atau TPPO	10 orang		10 orang	10 orang	10 orang	

		Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100%		100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	12 orang	12 orang	14 orang	16 orang	18 orang	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA SEJAHTERA (KS)							

		Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Kelompok kegiatan yang terbentuk	239 Kelompok	248 Kelompok	252 Kelompok	256 Kelompok	261 Kelompok	
		Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	20 Unit	33 Unit	30 Unit	11 Unit	11 Unit	
		2. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

			Keluarga/UPPKS)						
		3. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	132 Orang	33 Orang	176 Orang	220 Orang	220 Orang	
		4. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	801 Orang	801 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	

		Keluarga/UPPKS)	dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						
		5. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
		6. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,	0	11 Kelompo k	2 Kelompo k	2 Kelompo k	2 Kelompo k	

		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
		Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta dari Kecamatan yang berpartisipasi pada Jambore FAD	1 Kecamat an	1 Kecamat an	3 Kecamat an	3 Kecamat an	3 Kecamat an	
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	

		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
		Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan pada pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pencegahan KtPA/TPPO	10 Dokume n		12 Dokume n	12 Dokume n	12 Dokume n	
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	

		Sub Kegiatan : 1. Penyediaan layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	40 Orang	45 Orang	50 Orang	55 Orang	
		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan/atau TPPO	35 Layanan		10 Layanan	10 Layanan	10 Layanan	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/ BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2022)	TARGET				SKPD PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT (RO)			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)
	Domain Gender dan Diskriminasi : 1. Perkawinan usia anak 2. Pemuda perempuan sedang Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi 3. Pemuda perempuan bekerja di sektor formal		Persentase pemuda perempuan berusia 20 - 24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia 18 tahun						
	Bentuk Koordinasi : a. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, hiv, dan perdagangan manusia b. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan		Persentase pemuda perempuan berusia 16 - 24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ Sederajat atau lebih tinggi						

<p>konflik sosial</p> <p>c. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan</p> <p>d. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental</p> <p>e. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya</p> <p>f. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa</p> <p>g. Peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda</p>	<p>Persentase pemuda perempuan berusia 16 - 30 tahun yang bekerja di sektor formal</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIL DAN KELUARGA BERENCAN A
		Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang terbentuk di Sekolah SLTP dan SLTA se Kabupaten Tanah Laut	7 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	
		Sub Kegiatan : Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Data Mikro di Semua Desa	17,78%	20,74 %	23,70%	26,67%	29,63%	

		Sub Kegiatan : 1. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	2 Unit	2 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit
		2. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
		3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan

		4. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA						
		Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pasangan Usia Subur ingin ber KB tidak Terpenuhi (Unmet Need)	9%	8,67%	8,53%	8,40%	8,27%
		Sub Kegiatan : 1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		12 Organisasi	12 Organisasi	12 Organisasi	12 Organisasi

		2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dukungan bahan media KIE (Momentum dan Kearifan Lokal) (BOKB)	4 Paket	0	2 Paket	2 Paket	2 Paket	
		3. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		4. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini (Rakordes), dan Mini	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	

			Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					
		5. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	11 Laporan	12 Lapor an	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		6. Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	12 Lapor an	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

		Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase capaian Pendayagunaan Petugas KB di Lini Lapangan	100%	100%	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : 1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		12 Organisasi	12 Organisasi	12 Organisasi	12 Organisasi	
		2. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	556 Orang	556 Orang	556 Orang	556 Orang	556 Orang	

		Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelayanan KB	74,68%	75,50 %	75,70%	75,90%	76,00%
		Sub Kegiatan : 1. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		12 Organisasi	12 Organisasi	12 Organisasi	12 Organisasi
		2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.065 Orang	1.171 Orang	800 Orang	850 Orang	900 Orang

		3. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7 Unit	11 Unit	0	0	0
		4. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	63 Laporan	90 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan
		5. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta hak-hak Reproduksi di fasilitas Kesehatan dan kelompok kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas		33 Orang	44 Orang	55 Orang	55 Orang

			Kesehatan dan Kelompok Kegiatan					
		Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan : 1. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
		2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa	22 Kampung KB	23 Kampung KB	5 Kampung KB	5 Kampung KB	5 Kampung KB

			Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
		Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Kelompok kegiatan yang terbentuk	239 Kelompo k	248 Kelom pok	252 Kelompo k	256 Kelompo k	261 Kelompo k
		Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	20 Unit	33 Unit	30 Unit	11 Unit	11 Unit

		2. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		3. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	132 Orang	33 Orang	176 Orang	220 Orang	220 Orang	

		4. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	801 Orang	801 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	
		5. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	

		6. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	11 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Presentase SKPD yang melaksanakan PPRG	4,64%	50%	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)		40 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	

			Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota						
		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			43 Dokumen	43 Dokumen	43 Dokumen	
		Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Pembinaan Pada Kelompok Industri rumahan		35 Kelompok	41 Kelompok	47 Kelompok	50 Kelompok	
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan		2.000 Orang	2.000 Orang	2.000 Orang	2.000 Orang	

		Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
		Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan		80%	85%	90%	100%	
		Sub Kegiatan : 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		25 Peran gkat daera h	25 Perangka t daerah	25 Perangka t daerah	25 Perangka t daerah	

		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pencegahan KtPA/TPPO			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan bagi perempuan Korban Kekerasan dan/atau TPPO	10 orang		10 orang	10 orang	10 orang	

		Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta dari Kecamatan yang berpartisipasi pada Jambore FAD	1 Kecamat an	1 Keca matan	3 Kecamat an	3 Kecamat an	3 Kecamat an		
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokume n	1 Doku men	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n		
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								
		Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%	100%	100%		

		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pencegahan KtPA/TPPO	10 Dokume n		12 Dokume n	12 Dokume n	12 Dokume n	
		Kegiatan : Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan : 1. Penyediaan layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	40 Orang	45 Orang	50 Orang	55 Orang	

	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan/atau TPPO	35 Layanan		10 Layanan	10 Layanan	10 Layanan	
--	--	---	------------	--	------------	------------	------------	--

Pj. BUPATI TANAH LAUT

Ttd

SYAMSIR RAHMAN